

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak itu pula bangsa Indonesia telah bebas dari belenggu penjajahan yang selama tiga setengah abad telah membelenggu bangsa Indonesia. Namun demikian berakhirnya masa penjajahan bukan berarti telah selesai perjuangan bangsa Indonesia. Dalam hal ini tidak bisa dihindarkan yakni dengan mengadakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan sebagainya. Pembangunan merupakan proses perubahan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang direncanakan menuju keadaan yang optimal yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Hakekat dari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah pembangunan manusia seutuhnya, seperti yang tersirat dalam UUD 1945. Dalam rangka pencapaian hal itulah pemerintah mencanangkan Pembangunan Program Jangka Panjang (PPJP) di dalam masa ini, masyarakat dan bangsa kita memasuki tahap pembangunan nasional penting, untuk itu diperlukan pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan yang perlu dirumuskan ke dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan yang termasuk bidang yang sangat vital. Indonesia yang merupakan salah satu

penduduknya 210 juta jiwa. Jumlah yang demikian besar merupakan modal besar bagi pembangunan sekaligus potensi konflik yang besar, apabila jumlah penduduk sebesar ini dapat berdayaguna secara tepat maka akan memberikan kontribusi yang besar bagi kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat Indonesia melalui pembangunan, akan tetapi hal itu sulit dicapai karena rendahnya kualitas produktivitas masyarakat Indonesia, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka.

Dalam penelitian Depnaker secara realita keberadaan angkatan Indonesia memiliki pendidikan, kualitas hidup dan skill yang rendah (85 % tamatan SD), (Egi Sudjana, 2000 : 1). Isu yang berkembang ini mengenai arus globalisasi yang melanda hampir di seluruh dunia, dan Indonesia tidak terlepas dari pada isu tersebut, percepatan arus informasi dan teknologi yang terjadi menjelang proses perdagangan bebas menuntut kualitas SDM yang benar-benara handal, bila perlu banyak belajar seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura, Thailand, bahwa investasi yang besar perlu diimbangi dengan tersedianya tenaga yang trampil. Di dalam UUD 1945 pada 31 (2) menyebutkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional. Pengertian ini diperluas dengan tidak membatasi pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan pada unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia, suatu bangsa yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara budi pekerti kemanusiaan dan

bangsa / ras, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan.

Indonesia dalam pembangunan jangka panjang tahap pertama telah berhasil mencapai tahap pendidikan universal tingkat sekolah dasar, walaupun pada masa itu pendidikan masih dalam taraf pemantapan sistem sebuah prestasi tersendiri dimana negara maju memerlukan waktu yang lebih dari 50 tahun untuk mencapai pendidikan universal 6 tahun berikutnya, akan tetapi Indonesia dalam mencapainya dalam kurun waktu 15 tahun sejak rencana dimulainya pada tahun 1969. Upaya peningkatan efisiensi pendidikan paling tidak dapat ditentukan oleh 2 hal yaitu pengelolaan pendidikan yang profesional dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang efisien merupakan salah satu strategi pokok Departemen (Dikbud / Diknas). Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan, pendidikan, secara institusional peningkatan efisiensi pendidikan akan ditentukan oleh keberhasilan ke dalam proses pendidikan.

Teori Neo Klasik, Douglas M. Windham mengatakan :

Program-program pendidikan yang efisien, yang berlangsung dalam sistem pasar yang sempurna, ditandai oleh lembaga-lembaga pendidikan yang berkemauan tinggi yang melakukan sistem monitoring sendiri dan proses penyeimbangan sendiri. Sehubungan dengan program-program pendidikan lain yang kompetitif. (Ace Suryadi, 1995 : 11)

Di pandang dari konsep efisiensi itu, mutu pendidikan akan ditandai oleh kemampuan program atau lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan cakap yang dibutuhkan oleh pasaran kerja (*Labour Market*)

Meskipun demikian, asumsi mekanisme pasar bebas sesungguhnya jarang diterapkan kepada pendidikan, terutama apabila bidang pendidikan dipandang umum dan universal. Pada umumnya pendidikan lebih dipandang sebagai "*Publik Good*" daripada sebagai komoditas pasar. Dalam hal ini persamaan (hak), keadilan dan pendistribusian kesempatan memperoleh pendidikan menjadi sangat penting, efisiensi ekonomis menjadi kurang penting karena tipe program pendidikan dipandang sebagai "*publik servis*". Jadi kesempatan untuk memperoleh pendidikan harus diberikan secara merata (*equally*) dan pelayanan-pelayanan pendidikan harus diberikan secara adil (*equitably*) kepada seluruh masyarakat. persoalan mutu-mutu pendidikan dinilai dari segi apakah penyediaan pendidikan itu efisien secara teknis, didistribusikan secara merata (*equally*), dan dikelola secara adil (*equitably*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan asumsi bahwa pendidikan dasar adalah "*Publik Good*" daripada sebagai komoditi pasar, masalah-masalah yang berkaitan dengan akses pendidikan yakni kesempatan pemerataan memperoleh pendidikan dan efisien sistem pendidikan, menjadi persoalan kebijakan pendidikan yang sangat penting di Indonesia sebagai dasar negara yang sedang berkembang.

Dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989, jelaslah sudah landasan konstitusi dan pelaksanaan program pendidikan nasional, akan tetapi UU No. 2 Tahun 1989 tersebut masih sangat banyak mengandung celah yang berakibat kurang maksimalnya mutu maupun hasil yang dicapai oleh dunia pendidikan kita. Khususnya hal ini terjadi pada program penyelenggaraan pendidikan di tingkat

- Kehidupan masyarakat : perubahan susunan gaya hidup, harapan serta aspirasi masyarakat dan sistem baru dalam pendidikan, politik, ekonomi, demografi dan sebagainya.
- Nilai budaya : pergantian dan pergeseran gagasan, mutasi nilai-nilai perubahan peranan wanita, struktur keluarga dan sebagainya.
- Lingkungan hidup : kelangkaan sumber alam, peristiwa dan bencana alam.
- Informasi : ruang lingkup dan kualitas informasi, konsep baru tentang bagaimana sesuatu berfungsi.
- Kebudayaan : penyebaran dan pengalihan ide, nilai dan kebiasaan dari suatu unsur kebudayaan kepada yang lainnya.

Memasuki abad ke 21 pendidikan di Indonesia berhadapan dengan berbagai alternatif masa depan yang belum menentu. Kegagalan membuat suatu proyeksi atau skenario program pendidikan kita maka berarti kehilangan kesempatan untuk lebih maju dalam bidang pendidikan nasional tapi kita kiga harus ingat akan kebutuhan yang realistis yang berkenaan dengan fasilitas dan lingkungan sekolah (gedung, sarana belajar, guru, pengelolaan, proses belajar serta kurikulum).

Sementara itu di kota Tegal adalah salah satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan dunia pendidikan. Kota Tegal merupakan sebuah kota yang berada di jalur pantura. Kota Tegal dari tahun ke tahun terus berkembang pesat pembangunannya karena kota Tegal berada di jalur pantura yang selalu dilalui oleh orang-orang yang berkendara. Mau tidak mau kota Tegal harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang

PP No. 65 Tahun 1951 khususnya pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) tentang pengelolaan pendidikan dasar, jiwa dari PP No. 65 Tahun 1951 yang memisahkan tanggung jawab penyelenggara Sekolah Dasar kepada Depdagri dan Depdikbud yang terkenal dengan dualisme penyelenggaraan Sekolah dasar ternyata dalam PP No. 28 Tahun 1989 pun masih belum dibenagi tentang persoalan ini yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mutu pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar. Mengingat bahwa pendidikan dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama, maupun oleh masyarakat dalam hal ini badan atau yayasan yang bersifat sosial. Peraturan pemerintah ini juga mengatur pembagian wewenang, tanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar, diantara para penyelenggara pendidikan dasar yang bersangkutan. Di samping itu peraturan pemerintah ini juga memberi peluang bagi satuan pendidikan dasar maupun bagi peneliti dan pengembang di dunia pendidikan untuk melakukan penelitian dan uji coba untuk mengembangkan gagasan baru atau dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar di masa yang akan datang akan berhadapan dengan situasi dan persoalan yang dapat mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari globalisasi dan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kota Tegal itu sendiri. Karena letaknya yang strategis maka pemerintah daerah pun terus gencar melakukan pembangunan di segala bidang.

Dari sektor pendidikan, instansi / dinas yang terkait melakukan tahap perbaikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pembaharuan-pembaharuan terus dilakukan baik sarana dari segi kebijakan maupun sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Pemerintah daerah kota Tegal akan berusaha pemeratakan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Dengan adanya peningkatan mutu pendidikan di kota Tegal diharapkan nanti di masa depan dapat menjadi kota Bahari yang kaya akan Sumber Daya Manusia yang handal. Oleh karena itu arah kebijakan sektor pendidikannya harus benar-benar tepat sasaran sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur. Di sini peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting karena merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap mutu pendidikan serta mengimplementasikan kebijakan sektor pendidikan bagi masyarakat yang ada di daerahnya. Perihal apa yang menjadi keputusan dari dinas tersebut yang terkait dengan kebijakan pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong masyarakat dan pembangunan nasional dengan biaya yang

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2005 ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2005 ?

## **C. KERANGKA DASAR TEORI**

Kerangka dasar teori merupakan uraian menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Sehingga akan tampak jelas, sistematis, dan ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai unsur terpenting adalah teori, karena mempunyai peranan yang sangat besar dalam mencoba menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada. Adapun menurut Masri Singarimbun yang dimaksud dengan definisi teori adalah sebagai berikut :

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kotak, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat teori adalah :

Merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai gejala yang

Dengan demikian teori pada dasarnya merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Berdasarkan konsep tersebut di atas dapat dikatakan kerangka dasar teori sebagai berikut :

## 1. Kebijakan Publik

### a. Pengertian

Pengertian kebijakan publik dapat kita temukan dalam kepustakaan ilmu pemerintahan. Namun harus diakui bahwa untuk memperoleh definisi yang benar-benar memuaskan adalah sangat sulit, karena sifatnya yang terlalu luas, kabur atau tidak spesifik dan operasional. Chief J.O Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

*"a sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problem that affect society at large"*

"Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat"

(Solichin, 1991 : 51).

Peter mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

Keseluruhan aktivitas pemerintah baik dilakukan sendiri maupun melalui berbagai badan yang lain yang dimaksud untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. (Peters, 1982 : 4)

Kedua definisi di atas dapat kita lihat penekanan akibat dari suatu

mempengaruhi masyarakat. artinya bahwa kebijakan publik ditempatkan untuk menjadi “pengatur” dalam masyarakat.

Kedua definisi ini berbeda dengan dua definisi yang pertama pada definisi kedua ini yang menjadi sorotan adalah siapa yang membuat kebijakan publik yaitu pemerintah, termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya. Jadi kebijakan publik disini diartikan sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Rose mengemukakan pendapat lain yang juga dikutip oleh Dunn :

“Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menyangkut tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat”. (Samudra, 1994).

Pendapat ini adalah yang terlengkap, semua hal yang menjadi sorotan dari definisi kebijakan publik di dua bagian. Sebelumnya sudah tercakup di dalamnya, selain itu definisi ini juga memberikan pengertian yang lebih luas mengenai kebijakan publik bahwa kebijakan publik tidak hanya dalam bentuk tindakan (*actions*) akan tetapi termasuk juga sikap ‘membiarkan’ dari pemerintah. Definisi inilah yang diakhiri banyak menjadi pegangan untuk menjelaskan kebijakan publik sebagai mana nantinya yang digunakan dalam penelitian ini.

Kebijakan publik menurut penulis adalah suatu program yang mengandung tujuan serta sasaran tertentu dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa atau serangkaian tindakan-

untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

b. Proses Kebijakan Publik

1. Fungsi

- a. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. (Dunn, 1998 : 610)

2. Implementasi

Mengenai proses implementasi kebijakan dengan berusaha mengungkapkan proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. (Dunn, 1998 : 611)

3. Evaluasi

Prosedur kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, karena hasil memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran.

c. Model Kebijakan Publik

Model kebijakan (*policy models*) adalah representasi sederhana

disusun untuk tujuan tertentu. Model-model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan antar faktor-faktor atau variabel-variabel penting dan membantu menjelaskan dan memprediksi konsekuensi dari pilihan kebijakan. Adapun model-model kebijakan publik adalah :

1. Model elite

Multiple competition model ini merupakan abstraksi dari proses kebijakan dimana kebijakan publik dikatakan identik dengan perspektif elite politik. Dalam model ini kehidupan sosial terlihat terdiri atas dua lapisan, yakni lapisan atas dengan jumlah yang sangat kecil yang selalu mengatur, karena itu kebijakan negara mencerminkan kehendak atau nilai-nilai kelompok kecil orang yang berkuasa.

2. Model kelompok

Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara *bargaining*, negosiasi dan kompromi. Tuntutan-tuntutan yang saling bersaing diantara kelompok-kelompok yang berpengaruh dikelola

### 3. Model rasional

Model rasional ini berasal dari pemikiran Herbert Simong tentang perilaku administrasi. Simong menekankan bahwa inti dari perilaku administrasi adalah pada proses pengambilan keputusan secara rasional. Karena itu suatu kebijakan negara haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Semakin rendah nilai pengorbanan dan semakin tinggi tingkat pencapaiannya maka suatu kebijakan dianggap baik. Dengan kata lain model menekan pada spek efisiensi maupun ekonomis.

### 4. Model Inkremental

Model inkremental ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Kritik tersebut pertama kali dilontarkan oleh Charles Lindblom yang mengatakan bahwa para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara ajeg terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya. Para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang dipersyaratkan oleh pendekatan rasional. (T.R. Dye, 1998 : 81)

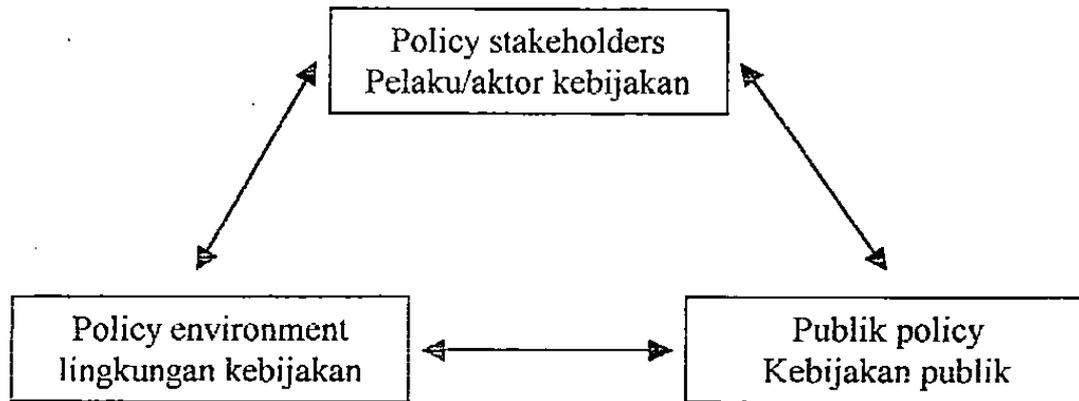
### d. Sistem Kebijakan

Dapat dipahami sistematik kebijakan sebagai suatu sistem memiliki

..... Model Politik Komparasi ini

## Bagan I.1

## Hubungan Antara Komponen Sistem Kebijakan



Sumber : Samodra Wibawa

Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan. Sistem kebijakan adalah realitas subyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan. Dan para analisis kebijakan tidak berbeda dari aktor-aktor kebijakan lainnya. Merupakan pencipta dan hasil ciptaan sistem kebijakan. (Dunn, 1998 : 111)

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Jimmi Mohammad Ibrahim menyebutkan publik policy dan implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai :

1. *Perilaku kebijakan*, yaitu badan pemerintah yang terlihat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh kebijakan.
2. *Lingkungan kebijakan*, yang dimaksud dengan lingkungan adalah bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. Misalnya demokrasi, pengangguran, kriminalitas, efisien dan produktifitas kerja, pencemaran alam, urbanisasi, diskriminasi, ketimpangan distribusi pendapatan dan sebagainya.
3. *Kebijakan publik*, adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan (atau menyelesaikan masalah) kehidupan masyarakat. (Samodra, 1994 : 50)

Ketiga komponen tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut : lingkungan kebijakan misalnya : kriminalitas, inflasi, pengangguran, kesejahteraan, kesehatan. Pelaku atau aktor kebijakan misalnya : analisis kebijakan, partai, instansi, kelompok warga negara, serikat pekerja, birokrat. Kebijakan publik misalnya : perkotaan, perpajakan, pinjaman daerah, hukum, lingkungan, pendidikan.

Suatu implementasi urusan kepentingan umum, urusan kenegaraan atau dapat juga disebut sebagai implementasi kebijakan pemerintah. (Jimmi, 1991 : 14)

Lebih lanjut E.S Duade dalam William N. Dunn mendeskripsikan implementasi kebijakan sebagai :

Suatu bentuk implementasi yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan daripada pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. (Dunn, 1998 : 96)

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan bermaksud memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperoleh data atau informasi guna memberikan alternatif cara pemecahan suatu masalah maupun alternatif cara pemecahan suatu masalah maupun alternatif pencapaian tujuan. (Samodra, 1994 : 52)

Sifat keputusan tersebut dapat berupa rasional, birokrasi dan politis. Sifat implementasi kebijakan dalam kehidupan bernegara secara umum yaitu : (1) konsep *technoratic guidance* (2) konsep *technoraticoncel* (3) kombinasi dari kedua konsep tersebut. (Jimmi, 1991)

Dalam implementasi kebijakan, kata implementasi digunakan dalam pengertian yang paling umum termasuk pengguna intuisi dan pengungkapan pendapat, dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilahkannya ke dalam sejumlah komponen, tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat

terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa implementasi kebijakan bersifat informal, meliputi tidaklebihdari proses berfikir yang keras dan cermat sementara yang lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan perhitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih.

Perkembangan disiplin implementasi kebijakan selama dua dasawarsa terakhir memberikan arah yang lebih tegas, bahwa fungsi implementasi kebijakan dengan politik adalah saling melengkapi (*complementary*). Salah satu alasan utamanya adalah bahwa kebijakan yang baik adalah yang didasarkan pada tiga macam pengetahuan yang ada di dunia yaitu : (1) *scientific knowledge* yang diperoleh secara empiris, (2) *personal knowledge* yang diperoleh seseorang dari pengalaman, dan (3) *social knowledge* yang diperoleh sebagai hasil interaksi di dalam kelompok sosial dan merupakan keinginan kelompok sosial. (Jimmi, 1991)

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau pun kelompok. Yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk di dalamnya adalah upaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah

yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan.  
(Penulis, 2002)

William N. Dunn meletakkan paradigma dalam implementasi kebijakan sebagai suatu pernyataan yang harus dijaga ketika melakukan implementasi kebijakan :

Implementasi kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif dan perspektif. Implementasi kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan, yaitu : 1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, 2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan 3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. (Dunn, 1998 : 97)

Selanjutnya dengan berpedoman pada paradigma tersebut, maka terdapat tiga bentuk utama implementasi kebijakan yaitu implementasi prospektif, implementasi retrospektif dan implementasi terintegrasi. Implementasi kebijakan prospektif adalah implementasi yang dilakukan sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Implementasi kebijakan retrospektif adalah implementasi yang dilakukan setelah adanya kebijakan yang mengkombinasikan prospektif dan retrospektif. Bahkan bentuk kombinasi ini menuntut implementasi untuk terus menerus melakukan dan menghasilkan implementasi berlangsung terus menerus,

### 3. Pendidikan

Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu : pedagogi (pendidikan) dan pedagogik (ilmu pendidikan). Dalam pengertian yang sederhana dan umum maka pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai dan norma tersebut serta mewariskan pada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai silsilah pendidikan atau sebagai cita-cita dan tujuan pendidikannya. Sekaligus juga menunjukkan sesuatu bagaimana warga negara, bangsanya berfikir dan berperilaku secara turun temurun hingga kepada generasi berikutnya yang dalam perkembangannya akan sampai pada tingkat peradaban yang maju.

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib dan teratur, efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil) akan mampu mempersiapkan jalannya peradaban bangsa yang berdasarkan nilai-nilai

- c. Crow and crow menyebut pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi dan generasi (Tilaar, 1992 : 75)

Dapat disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dari seluruh uraian tentang pengertian pendidikan dasar di atas dapat dikemukakan arti dari pendidikan yaitu sebagai berikut :

- Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta ketrampilan-ketrampilan).
- Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita / tujuan pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.
- Pendidikan berarti pula hasil atau potensi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya.

#### **4. Pendidikan Dasar**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 pasal 1 sebagai pelaksana UU NO. 2 Tahun 1989 disebutkan :

penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan bangsa kita sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan pendidikan tidka terlepas dari faktor psikologi manusia, di samping faktor lingkungan sekitar maka proses pendidikan perlu atau wajib berpegang pada petunjuk-petunjuk dari para ahli psikologi pendidikan dan perkembangan, termasuk psikologi agama. Tanpa petunjuk psikologi proses pendidikan tidak mengena pada sasarannya secara tepat guna. Pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, di mana iman dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi yang utama. Ada beberapa definisi tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli.

- a. Driyarkara : pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia dalam taraf insani itulah yang disebut mendidik. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda (Ditjen Dikte, 1983 : 14).
- b. Ki Hajar Dewantara dalam Konggres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan : pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (intelekt) dan tubuh anak; dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan kehidupannya (Tilaar, 1992 : 70)

enam tahun di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

Ciri-ciri esensi dari pendidikan dasar menurut tim pengarah dan tim materi peningkatan wawasan kependidikan guru menyebutkan (Tim Pengarah dan Materi Depdikbud : 10) :

*Pertama* : Pendidikan dasar merupakan pendidikan umum. Pendidikan Umum (General Education) mengandung arti bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Dalam pasal 11 ayat (2) UUSPN dikemukakan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan ketrampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir-akhir pendidikan. *Kedua* : Pendidikan dasar berlangsung sembilan tahun, yaitu enam tahun dan tiga tahun di tingkat SLTP atau sederajat. Hal ini tidak berarti pendidikan SD dan SLTP berada dalam satu atap, melainkan tetap terpisah, meskipun keduanya merupakan pendidikan dasar. Dengan pengertian ini, pendidikan dasar menunjuk pada bentuk satuan pendidikan seperti dikemukakan dalam pasal PP No. 28 Tahun 1990. Dengan adanya pendidikan dasar, SD dan SLTP tetap ada dan penyebutannya tidak mengalami perubahan. *Ketiga* : Pendidikan dasar tidak bersifat uniform, meskipun pendidikan dasar merupakan pendidikan umum, tidak semua peserta didik mendapatkan materi yang kurikulum yang sama seluruhnya, atau bersifat uniform, melainkan dimungkinkan adanya perbedaan

13 bidang kajian, hal ini dijamin oleh UUSPN maupun PP No. 28 Tahun 1990. *Keempat* : Pendidikan dasar dilakukan di jalur sekolah dan luar sekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan. *Kelima* : Lulusan pendidikan dasar adalah setara lulusan pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah beserta wahananya, sehingga memberikan keleluasaan gerak bagi peserta didik. Hal ini dijamin dalam pasal 23 ayat (1) UUSPN "Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik".

Indonesia dalam pembangunan jangka panjang tahap pertama telah berhasil mencapai tahap pendidikan universal tingkat sekolah dasar, walaupun pada masa itu pendidikan masih berada dalam taraf pemantapan sistemnya. Sebuah prestasi tersendiri dimana negara maju memerlukan waktu yang lebih dari 50 tahun untuk mencapai pendidikan universal 6 tahun bagi rakyatnya, akan tetapi Indonesia dalam mencapainya dalam kurun waktu 15 tahun sejak rencana dimualinya pada tahun 1969. Pendidikan dasar dipandang penting karena beberapa hal menurut Prof. DR. H.A.R. Tilaar. M.Sc :

- a. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, pendidikan dasar itu adalah dasar atau fondamen dari masyarakat yang kita bina.
- b. Pendidikan dasar adalah tuntutan konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 mewajibkan kepada negara untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dan pengajaran, sehingga pendidikan itu menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia.

pemerintah berkepentingan dengan pendidikan rakyatnya.. sampai dimana keterlibatan pemerintah dalam masalah-masalah pendidikan sangat bergantung pada budaya yang dianut negara tersebut. Di negara-negara otoriter, seratus persen masalah pendidikan ditangani oleh pemerintah. Sedangkan di negara-negara liberal, keterlibatan pemerintah ini sangat minim sekali. Terlepas dari besar kecilnya keterlibatan pemerintah, tetapi jelas bahwa pendidikan merupakan masalah pemerintah atau lebih jelasnya adalah masalah publik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan ini dapat merupakan suatu substansi kebijakan pemerintah.

#### **5. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Dalam kerangka pembangunan bangsa, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan *critical mass* di bidang pendidikan. *Critical Mass* adalah suatu konsep yang mengupayakan adanya suatu persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertentu yang harus disiapkan oleh suatu bangsa agar pembangunan dapat meningkat dengan cepat, karena adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan *critical mass* tersebut. Wajib belajar dilaksanakan untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang terdidik, minimal memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial. Dengan

- c. Dengan lahirnya UU NO. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, maka landasan yuridis dan operasionalnya telah tersedia sebagai langkah pertama secara mantap untuk mewujudkan cita-cita proklamasi ialah mewujudkan bangsa Indonesia yang yang cerdas. Dengan diundangkannya pendidikan dasar 9 tahun mewujudkan tekad bangsa kita untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia.

Setiap pemerintah selalu berusaha agar kebijaksanaannya selalu dipatuhi oleh rakyatnya. Banyak upaya yang sering ditempuh oleh pemerintah atau organisasi ini untuk membina kepatuhan ini. Pertama, kebijakan ini bertumpu pada kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan. Asumsinya bila kebutuhan dasar ini telah terpenuhi, akan kemungkinan besar akan mengurangi pertentangan atau konflik yang gawat. Kedua, ganjaran dan hukuman, cara ini yang klasik yang sampai sekarang masih dipergunakan / masih berlaku. Maksudnya ialah memantapkan atau "*enforcement*" suatu kebijaksanaan dengan memberikan hukuman pada pilihan di luar kebijaksanaan dan memperoleh ganjaran bila melakukan seperti yang dituntut kebijaksanaan. Ketiga, membina kepatuhan yang berjangka panjang atau menengah. Hal ini dilakukan dengan pendidikan dan sosialisasi politik kebijaksanaan pendidikan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan politik rakyat adalah upaya instrumental demi kepentingan politik yang berkuasa. Sedangkan pendidikan memenuhi kebutuhan

Hal ini merupakan langkah yang sangat penting pada saat ini hampir semua

pendidikan yang lebih tinggi atau dijadikan bekal untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Karena itu penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bukan semata-mata sekedar untuk mencapai target angka partisipasi secara maksimal, namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar yang sekarang ini masih jauh dari standar nasional (Djati Sidi, 2001 : 98).

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dicanangkan pada tahun 1994. Di mana pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dilakukan melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia lebih siap memasuki pasar global, baik pasar bebas AFTA (Asian Free Trade Area) tahun 2002 maupun APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) tahun 2010. Pelaksanaan Wajib Diknas 9 Tahun itu meliputi program 6 tahun (di SD) dan program 3 tahun (di SLTP). Pola-pola yang diterapkan di tingkat SD antara lain : SD Reguler, SD Kecil, SD Pamong, SD Terpadu, Madrasah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren, SDLB dan Kelompok Belajar Paket A. Sedang pola-pola untuk tingkat SLPT adalah SLTP Reguler, SLTP Kecil, SLTP Terbuka, SLTP Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantren Salafiyah, SLTPLB dan Kelompok Belajar Paket B.

Beberapa Program Pendukung Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun yang dilaksanakan selama ini meliputi pendataan dan pemetaan sekolah penyuluhan dan publikasi, pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat dan

3. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.
4. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat karena merupakan dasar atau fundamental dari masyarakat yang kita bina.
5. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah merupakan kelanjutan dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun yang telah dicanangkan pada tahun 1984 yang dilaksanakan untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang terdidik, minimal memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar yang esensial.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel untuk mempermudah variabel penelitian. Variabel penelitian ini meliputi :

1. Dasar hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang kebijaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun
  - a. Keputusan Menteri
  - b. Peraturan Pemerintah
  - c. Undang-Undang Pendidikan Nasional
2. Perencanaan dan pelaksanaan program penuntasan kebijakan wajib belajar

/ kotamadya yang berhasil menuntaskan wajib belajar 9 tahun serta Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan kelanjutan dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun yang telah dicanangkan pada tahun 1984. gerakan Wajar ini wajib kita hargai dan kita sambut dengan baik karena dengan program tersebut sedikitnya 2 juta anak usia sekolah 7-15 tahun akan dapat mengenyam dan memperoleh pendidikan dasar dan menengah. Dengan Wajar Dikdas ini, kita dapat menyiapkan generasi penerus yang potensial guna membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

#### **D. DEFINISI KONSEPSIONAL**

1. Kebijakan publik adalah suatu program yang mengandung arti tujuan serta sasaran tertentu dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa atau serangkaian tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan yang ditetapkan oleh aparat pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
2. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu ataupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk di dalamnya adalah supaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk

... ..

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun di Kota Tegal.
4. Hasil yang dicapai dari implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun di Kota Tegal.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah.

Winarno Surachmad berpendapat :

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

### 1. Jenis Penelitian

Sehubungan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Winarno Surachman : penelitian yang deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada di masa sekarang, karena banyak sekali ragam penelitian yang demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang menyangkut pemecahan berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan

studi operasional. Tidak mengherankan jika mudah timbul kekaburan untuk istilah tersebut (Winarno, 1980 : 42).

Meskipun bentuk-bentuk metode ini banyak, namun ada sifat-sifat tertentu yang ada, pada umumnya terdapat dalam metode deskriptif ini. Adapun ciri-ciri metode ini adalah :

- 1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang pada masalah-masalah actual.
- 2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif exploratif yakni penelitian yang menggambarkan apa yang sudah ada dan terjadi, tidak menutup kemungkinan adanya pencarian atau penemuan baru dari obyek-obyek yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi obyek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

Adapun alasan memilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal sebagai daerah penelitian adalah :

- Tegal sebagai daerah transit yang terletak di pantura yang dituntut tinggi kualitas sumber daya manusia.
- Penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang diambil pemerintah setempat dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan dunia pendidikan di wilayahnya.

### 3. Unit Analisa Data

Unit analisa data adalah satuan terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti. Sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Berdasarkan substansi tersebut maka kepala bagian pendidikan luar sekolah, kepala bagian pendidikan dasar, kepala bagian perencanaan pendidikan di kota Tegal yang akan diminta informasinya untuk dijadikan data sebagai basis data.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam usahan pengumpulan data yang diperlukan dan obyek penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Interview / Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat teknik ini adalah menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan.

#### b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh oleh penulis dalam mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen atau catatan yang tersedia

Winarno Surachmad mengatakan : Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Dengan perumusan tersebut kita dapat memasukkannya ke dalam notulen, rapat, majalah, iklan dan lain sebagainya (Winarno, 1980 : 163)

c. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam pencarian data penelitian untuk mengetahui adanya rangsangan tertentu yang diinginkan dengan cara mengamati langsung, observasi partisipasi adalah pengamat ikut terlibat ke dalam kegiatan yang sedang diamati atau dengan kata lain pengamat ikut menjadi pemain. Sedangkan observasi simulasi diharapkan seorang pengamat dapat mensimulasi keinginannya pada responden yang dituju, sehingga memenuhi keinginan seorang pengamat yang butuh informasi atau data.

5. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah penelitian deskriptif, maka dibutuhkan data penelitian primer dan sekunder. Dalam hal ini Winarno Surachmad berpendapat : Data primer ialah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar dari penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu adalah sungguh data yang asli. Jenis data primer dapat

- a. Data primer yaitu data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dasar di Sekolah Dasar dan SMP.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai kebijakan pendidikan dasar di Sekolah Dasar dan SMP.

#### 6. Teknik Analisa Data

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kaulitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa fenomena atau objek yang diteliti dan merealisasikan data atas dasar teori yang ada secara runtut dan memakai makna yang bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran akan tetapi terdapat angka-angka di dalam tabel yang merupakan data pelengkap saja. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah, wawancara, catatan, laporan, dokumentasi,